

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fokus penelitian ini terdapat pada Kepemimpinan Kepala Desa membangun Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan wilayah terkecil Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan jika kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Melihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat di desa, sebagian besar tingkat kesejahteraannya tergolong rendah karena sebagian besar pekerjaan dan penghasilan yang di dapat oleh masyarakat desa hanya dengan mengandalkan hasil sumber daya yang ada yaitu sebagai buruh tani. Sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik oleh masyarakat desa agar hasil pengelolaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga.

Membahas mengenai pekerjaan masyarakat desa yaitu sebagai buruh tani, masyarakat desa khususnya masyarakat desa Sabungan Nihuta II menggunakan sebagian besar tanah yang sudah di wariskan turun menurun dimana masyarakat desa tersebut dapat mengelolah tanah tersebut dengan menanam tanaman, seperti jeruk, kopi, nenas, dan lainnya. Oleh sebab itu, mereka harus merawat dan melakukan

pemantauan tanaman yang ditanam setiap hari agar hasil pengelolaan tanaman tersebut dapat berhasil dan tidak rusak. Selain memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar masyarakat di desa Sabungan Nihuta II tersebut juga harus memikirkan pengeluaran untuk kebutuhan yang harus dibeli untuk merawat hasil tanamannya. Sebagian besar lainnya yang peneliti ketahui, dalam pengelolaan pertaniannya, masyarakat yang ada di desa Sabungan Nihuta II menggunakan alat bantu yang digunakan masih menggunakan alat bantu yang tradisional atau menggunakan tenaga yang ada dan belum menggunakan alat modernisasi pertanian karena kembali lagi dengan melihat hasil pendapatan yang didapat oleh masyarakat desa yang rendah. Masalah yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di desa tersebut dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk mensejahterakan masyarakat di desa sabungan nihuta II, maka pemerintah desa bersama masyarakat membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu **BUMDes MARTABE**, BUMDes Martabe didirikan pada tanggal 02 Oktober 2019 yang bergerak di bidang usaha pertanian oleh kepala desa Sabungan Nihuta II untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Martabe didirikan karena adanya dorongan dari masyarakat desa dan inisiatif pemerintah desa. dalam hal ini, kepala desa sebagai pemerintah desa setempat bertugas sebagai pengawas dalam mengelola BUMDes tersebut. Motto BUMDes Martabe yaitu sejarah bersama membangun desa dan visi nya yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaulat

dan sejahtera serta misinya yaitu meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan ketahanan pangan desa.

Untuk mensejahterakan masyarakat desa, maka BUMDes Martabe harus lebih baik lagi dalam mengelola usaha yang dibentuk dan cara mensiasati jika terjadinya kenaikan harga pada jenis usaha yang bergerak di bidang tani yaitu masalah yang sering terjadi pada unit usaha tersebut yaitu harga pupuk dan obat-obatan pertanian yang tidak menentu serta disini perlunya peran kepala desa selaku pimpinan dalam membantu BUMDes untuk mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu juga diciptakannya BUMDes dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian dan juga memberikan efek atas meningkatkannya pendapat asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat

BUMDes tumbuh menjadi wujud pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya usaha meningkatkan perekonomian desa yang bersumber pada pengelolaan potensi desa. Pemerintahan desa membentuk dan mengelola BUMDes berdasarkan otonomi daerah yaitu dengan adanya Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Lewat musyawarah desa, maka BUMDes

dibangun atas buah pikir dari masyarakat dan dapat mengumpulkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu BUMDes didasari oleh prinsip kooperatif partisipasi dan transparansi. Prinsip mengelola BUMDes dikerjakan seutuhnya oleh masyarakat desa sehingga BUMDes bekerja sama dengan lembaga ekonomi, perkembangan ekonomi beserta keadilan pembagian aset kepada masyarakat secara merata akan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi di desa Sabungan Nihuta II.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut untuk melakukan penelitian mengenai **“PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MEMBANGUN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SABUNGAN NIHUTA II, KECAMATAN SIPAHUTAR KABUPATEN TAPANULI UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara?
- Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan BUMDes di desa Sabungan Nihuta II?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Peran peran kepemimpinan kepala desa membangun badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan Nihuta II

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar

- Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sabungan Nihuta II, Kecamatan Sipahutar dan juga dapat memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan BUMDes

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya.

Menurut Anwar, peran merupakan pemain sandiwara atau sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Koziar Berbara teori peran terbagi menjadi 3 golongan :

1. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system.
2. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil

3. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Beberapa dimensi mengenai peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
2. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan.
3. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
4. Peran sebagai penganut strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

2.2 Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal : pertama, adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi, organisasi dan kedua, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan, mencakup proses kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya yaitu kepercayaan, etika, nilai, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran-kemahiran yang dimilikinya.

2.2.2 Teori Kepemimpinan

Pada dasarnya, teori kompetensi kepemimpinan memiliki dua macam yaitu teori perilaku, teori sifat. Teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Teori Sifat

Teori sifat disebut juga teori genetic, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan.

Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan intelegensi (kecenderungan) yang esensial bagi kepemimpinan yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan seseorang.

Berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi yang dimunculkan adalah kepemimpinan yang memerlukan serangkaian ciri tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakan pada kepribadian pemimpin itu sendiri.

b) Teori Perilaku

Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan memotivasi bawahan. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan menajadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman.

Teori ini mengutarakan bahwa pemimpin harus dipandang sebagai hubungan diantar orang-orang, bukan sifat sifat atau ciri seorang individu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan segenap anggotanya

Menurut Kartono (2008), gaya kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator :

1. Kemampuan Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

2. Kemampuan Memotivasi

Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kemampuan Komunikasi

Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik.

4. Kemampuan Mengendalikan Bawahan

Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif.

5. Tanggung Jawab

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan sampai menanggung akibatnya.

2.3 OTONOMI DESA

2.3.1 Desa

Desa adalah satuan masyarakat hukum dimana mempunyai batasan wilayah yang berkuasa mengelola serta menangani masalah pemerintahan, hak kedaerahan yang telah diakui serta disegani dalam sistem pemerintahan masyarakat, hak asal usul, serta NKRI desa dalam undang-undang No.6 tahun 2014.

Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa mempunyai tiga unsur yakni :

- Daerah, yang dimaksud dengan daerah yaitu tanah-tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- Penduduk, yaitu meliputi rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan kualitas penduduknya.
- Tata kehidupan desa yang berkaitan erat dengan norma, adat istiadat, dan aspek budaya lainnya yang berlaku.

Didalam desa terdapat pemerintah desa. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Ciri-ciri desa dari masyarakatnya sebagai berikut :

- a. Pekerjaan bersifat homogeny atau sama. Masyarakat lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan

- b. Masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota dan juga pertumbuhannya tidak massif dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi desa.
- c. Kepadatan penduduk tergolong rendah dapat dilihat antara rasio luas wilayah dengan jumlah penduduknya kecil.
- d. Lingkungan fisik, sosial dan budaya yang masih terjaga dengan baik.
- e. Stratifikasi sosial yang tidak terlalu mencolok.
- f. Mobilitas sosial masyarakat yang relatif rendah.
- g. Tradisi lokal masyarakat desa masih kuat yang diturunkan dari generasi ke generasi.

2.3.2 Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas yaitu mengatur masalah pemerintahan desa, melakukan pembangunan desa, melakukan pembinaan kepada masyarakat desa, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sesuai yang tercantum dalam ayat (1), Kepala Desa memiliki wewenang :

- 1) Sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Memiliki kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian para aparat desa (perangkat desa)
- 3) Sebagai pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan
- 4) Memiliki kewenangan dalam penetapan segala peraturan desa
- 5) Berwewenang dalam penetapan APBD
- 6) Membangun masyarakat agar lebih baik

- 7) Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Memajukan serta mewujudkan perekonomian desa agar masyarakat desa makmur dan sejahtera
- 9) Meningkatkan sumber penghasilan desa
- 10) Membangun kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- 11) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 12) Menjalankan tugas lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan

Kepemimpinan merupakan sifat dan perilaku yang mempengaruhi para bawahan, sehingga dapat bekerjasama daya produksi menjadi tinggi yang dapat menyebabkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Konsekuensi terhadap individu seorang pemimpin antara lain adalah :

- 1) Berani dalam pengambilan keputusan yang sulit secara tepat dan tegas
- 2) Berani menanggung resiko
- 3) Berani memegang tanggung jawab, dimana tanggung jawab tidak boleh dilimpahkan.

2.4 BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

2.4.1 Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang diartikan sebagai kesatuan yuridis (hukum), teknis, ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan sedangkan milik dapat diartikan sebagai kepemilikan atau kepunyaan sementara dan

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintah sendiri. Maka BUMDes merupakan serangkaian unit usaha yang yang diselenggarakan oleh system pemerintahan berdasarkan hukum tertentu dan digerakkan oleh masyarakat desa demi mencapai perekonomian yang layak.

Menurut Maryuani (2008:35), BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pendapat lain mengenai BUMDes yaitu menurut Rismawati (2018), BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan demikian, BUMDes adalah suatu lembaga kemasyarakatan atas inisiatif perangkat desa yang dimaksudkan untuk menciptakan ekonomi desa ke arah yang lebih baik berdasarkan potensi atau kebutuhan yang ada di desa tersebut.

2.4.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 4 Permendesa No 4 Tahun 2015 mengemukakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan beberapa pertimbangan, yaitu atas inisiatif desa dan atau masyarakat desa; potensi usaha ekonomi desa; sumber daya alam desa; sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan penyertaan modal dari

pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Menurut Herry Kamaroseid maksud dari pendirian BUMDes antara lain :

- a) Meningkatkan perekonomian desa
- b) Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d) Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Adapun tujuan dari pendirian BUMDes antara lain :

- a) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- b) Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c) Menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat desa

2.4.3 Peran Badan Usaha Milik Desa

Peran BUMDes menurut Seyadi (2003), yaitu sarana pemebangunan dan pengembangan dan kemampuan daya ekonomi masyarakat desa, yang pada dasarnya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun sosialnya. BUMDes sangat berperan aktif dalam usaha memperkokoh kualitas kehidupan masyarakat. BUMDes berperan sebagai pondasi penguat ketahanan tingkat ekonomi skala nasional dimana salah satu tujuannya dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan perekonomian

masyarakat desa. Serta BUMDes membantu kalangan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga berujung terciptanya masyarakat desa yang makmur.

Menurut Seyadi, indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu :

- a) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang sangat penting diantaranya memberikan stimulasi untuk lebih mengembangkan potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Menciptakan jiwa wirausaha terhadap lingkungan desa tersebut, sebab yang menjadi pengelola atau karyawan di setiap lembaga usaha Badan Usaha tersebut

merupakan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian BUMDes akan mampu meningkatkan laju tingkat perekonomian.

Menurut Herry Kamarsoeid, Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai berikut :

- a) Membangun dan mengelolah potensi-potensi desa serta mengelola kemampuan ekonomi masyarakat desa, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
- b) Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- c) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya
- d) Membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- e) Membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat.

Selama berdirinya BUMDes yang berusaha dalam membantu kesejahteraan masyarakat, maka hal yang sering terjadi dalam BUMDes tersebut adalah dalam pendanaan yang diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 yang dimana sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Masyarakat, Pemerintah Daerah/Provinsi. Dari sumber-sumber dana tersebutlah BUMDes mampu mengelolah dan juga dapat mengembangkan supaya lebih bagus dalam memberikan pelayanan di bidang penyediaan usaha tani

2.4.4 Usaha Yang Dikelola BUMDes

Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang secara definitive diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa.

Badan Usaha Milik Desa berdiri dengan dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usah milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan dalam Undang-Undang Desa, sebagian besar modal yang diberikan desa dikelola untuk mendirikan usaha BUMDes.

Usaha yang dikelola oleh BUMDes Martabe yang sebagian besar masyarakat desa tersebut berprofesi sebagai buruh tani maka usaha tersebut dapat digolongkan ke dalam bisnis sosial yang secara sederhana diartikan dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Usaha tersebut yang pastinya bergerak di bidang tani seperti penyediaan pupuk, obat-obatan pertanian, dan lainnya.

2.4.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa menjadi sebuah terobosan bagi setiap desa untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PADes. Munculnya inovasi ini berawal dari adanya

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.

BUMDes memiliki sistem kerja yang dimana mampu memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat desa dengan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki secara profesional dan BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan badan usaha yang dikelola dengan maksimal.

Pembentukan BUMDes juga berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, partisipasi dan demokrasi dengan keadaan desa untuk mengembangkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dimana dibutuhkan peran masyarakat bersama untuk menjalankan desa yang maju dan berkesinambungan. Ada 6 prinsip pengelolaan yang harus dijalankan yaitu :

1. Kooperatif. Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus bisa melaksanakan kerjasama yang baik untuk peningkatan serta kelangsungan hidup suatu usaha.
2. Partisipatif. Seluruh bagian yang berperan pada BUMDes harus memberikan dukungan untuk kemajuan BUMDes
3. Emansipatif. Seluruh bagian yang berperan dalam BUMDes diperlukan secara serupa tanpa membeda-bedakan golongan

4. Transparan. Kegiatan yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat secara terbuka
5. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis
6. Sustainable, yaitu aktivitas segala bisnis dalam BUMDes yang harus ditingkatkan serta dilestarikan oleh masyarakat desa.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Hyuman dalam Sukanto (2001:41), kesejahteraan masyarakat merupakan obyek studi ekonomika kesejahteraan yang merupakan analisis normative interaksi ekonomi yang ingin mencari kondisi bagi pemanfaatan sumber daya secara efisiensi. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan kebahagiaan jangka panjang ataupun terwujudnya harapan setiap maupun individu maupun kelompok dalam setiap kegiatan mencapai kebutuhan sehari-hari serta diperoleh nya keadilan ekonomi yang merata.

Untuk lebih lanjut lagi, menurut Badrudin (2012) mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat terpisahkan dari sudut pandang pembangunan

ekonomi karena hal tersebut disebabkan suatu pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Jika keberhasilan dari sebuah pembangunan tanpa mengikutsertakan kesejahteraan masyarakat mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam hubungan masyarakat itu sendiri.

2.5.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan meliputi semua bidang dalam kehidupan manusia, mulai dari sosial, teknologi, budaya, ekonomi yang mana bidang-bidang tersebut harus terus ditingkatkan pelayanannya oleh pemerintah sebagai wujud dari tujuan negara itu sendiri. Pengukuran kesejahteraan yang hanya dilihat dari indikator yang bersifat moneter seringkali terdapat ketidaksempurnaan ukuran tingkat kesejahteraan dalam masyarakat yang disebabkan lemahnya indikator moneter tersebut. Oleh karena itu, Buckerman membagi indikator kesejahteraan masyarakat dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang berupaya membuat perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat
2. Kelompok yang berupaya untuk melakukan penyusunan terhadap penyesuaian pendapatan masyarakat dibandingkan dengan mempertimbangkan ekonomi
3. Kelompok yang berupaya untuk melakukan perbandingan pada tingkat kesejahteraan setiap Warga Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Menurut (Icai, 2010) untuk mencapai suatu kesejahteraan harus memperhatikan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi :

1. Pemerataan pendapatan

Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan seperti semakin banyak pendapatan yang dimiliki maka semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator yang digunakan oleh seseorang untuk menggali potensi diri. Dalam hal ini juga sudah pasti bahwa jika seseorang ingin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan maka butuh usaha yang harus dilalui dengan melihat pendidikan yang dimilikinya dan tentu juga skill.

3. Kesehatan

Kesehatan sudah pasti menjadi salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan artinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapainya, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan

pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sabungan Nihuta II maka kesehatan paling perlu dijaga supaya mampu mengolah hasil tani.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara pada tahun 2019 melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang pada kesimpulannya menjelaskan peran BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tibubeneng dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hasil penelitiannya, Ni Luh melihat peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan melalui unit-unit usaha yang dikelola dibawah BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Faktor pendukung BUMDes adalah potensi berkembangnya desa di sektor ekonomi cukup tinggi karena karena terletak di daerah Kuta Utara yang memiliki potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik dan sumber daya manusia

yang mendukung, faktor penghambat BUMDes belum maksimal memberikan sosialisasi program BUMDes, memerlukan dukungan seluruh unsur masyarakat baik adat maupun dinas, SDM potensial yang dimiliki desa lebih memilih bekerja di instansi lain.

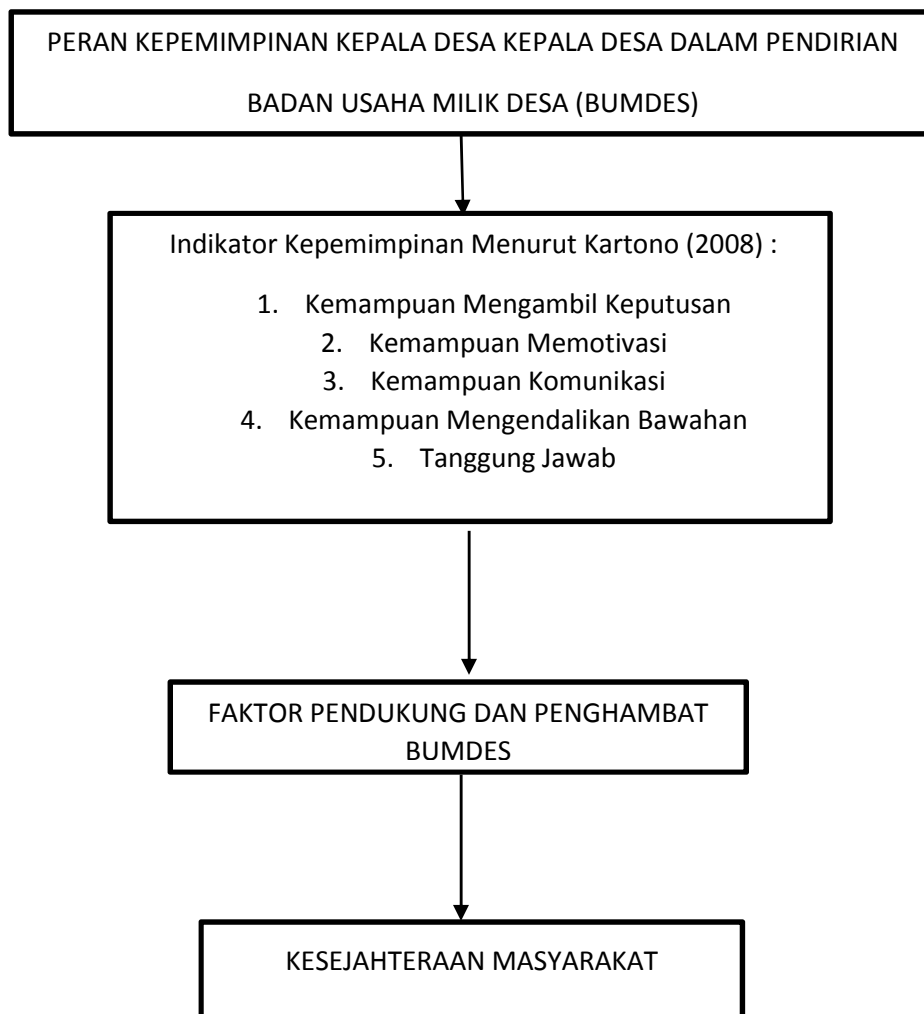
Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diambil oleh penulis terletak pada fokusnya, penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan unit usaha BUMDes. Faktor penghambat dalam penelitian Ni Luh Putu Sri Pradyani hanya kurangnya sosialisasi namun sumber daya manusia nya sudah cukup efisien, sedangkan dalam penelitian penulis yang menjadi faktor penghambat nya yaitu masih kurangnya SDM dan pembinaan ataupun sosialisasi kepada masyarakat

2. Hasil penelitian yang telah dilakukan Hirda Hustani Barti dan Maswar Putuh Priyadi dengan judul Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2020 melalui metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori analisis yang pada kesimpulannya menjelaskan pengoptimalan penggunaan dana desa terhadap pembangunan BUMDes untuk menuju desa mandiri pada Desa Kalikatur, dan faktor yang menghambat dan mendukung dalam mengetahui potensi unit desa baru dan lapangan pekerjaan yang tercipta bagi masyarakat dengan pengembangan BUMDes, dan pengembangan BUMDes dalam pelaksanaannya sudah optimal atau belum.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang diambil oleh penulis yaitu penelitian ini fokus kepada penggunaan dana desa dalam pengembangan BUMDes apakah penggunaan dana desa sudah efektif atau tidak, dan dalam penelitian penulis fokus kepada peranan BUMDes didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apakah sudah efektif atau belum.

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan “Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dari menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan”. (Creswell 2013:4-5). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, yang bertujuan untuk mempelajari secara lebih mendalam tentang situasi atau interaksi suatu lembaga, kelompok sosial maupun individu.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Martabe yang berlokasi di Jl. Dr. Td. Pardede Desa Sabungan Nihuta II Kecamatan Sipahutar

b) Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini bulan Juni 2022 – Agustus 2022

3.3 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 bagian yaitu informan kunci sebagai yang mengetahui informasi pokok yang diperlukan si peneliti, informan utama sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi penelitian, informan tambahan sebagai orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Sabungan Nihuta II sebagai informan kunci
2. Pegawai BUMDes sebagai informan utama
3. Masyarakat Desa sebagai informan tambahan.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan dilakukan melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi untuk mencari data-data yang lengkap. Teknik pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara peneliti dengan informan dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui informasi yang telah ada sebelumnya. Adapun bentuk pengumpulan data sekunder yang dilakukan adalah :

a. Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti buku, karangan ilmiah, dan sebagainya

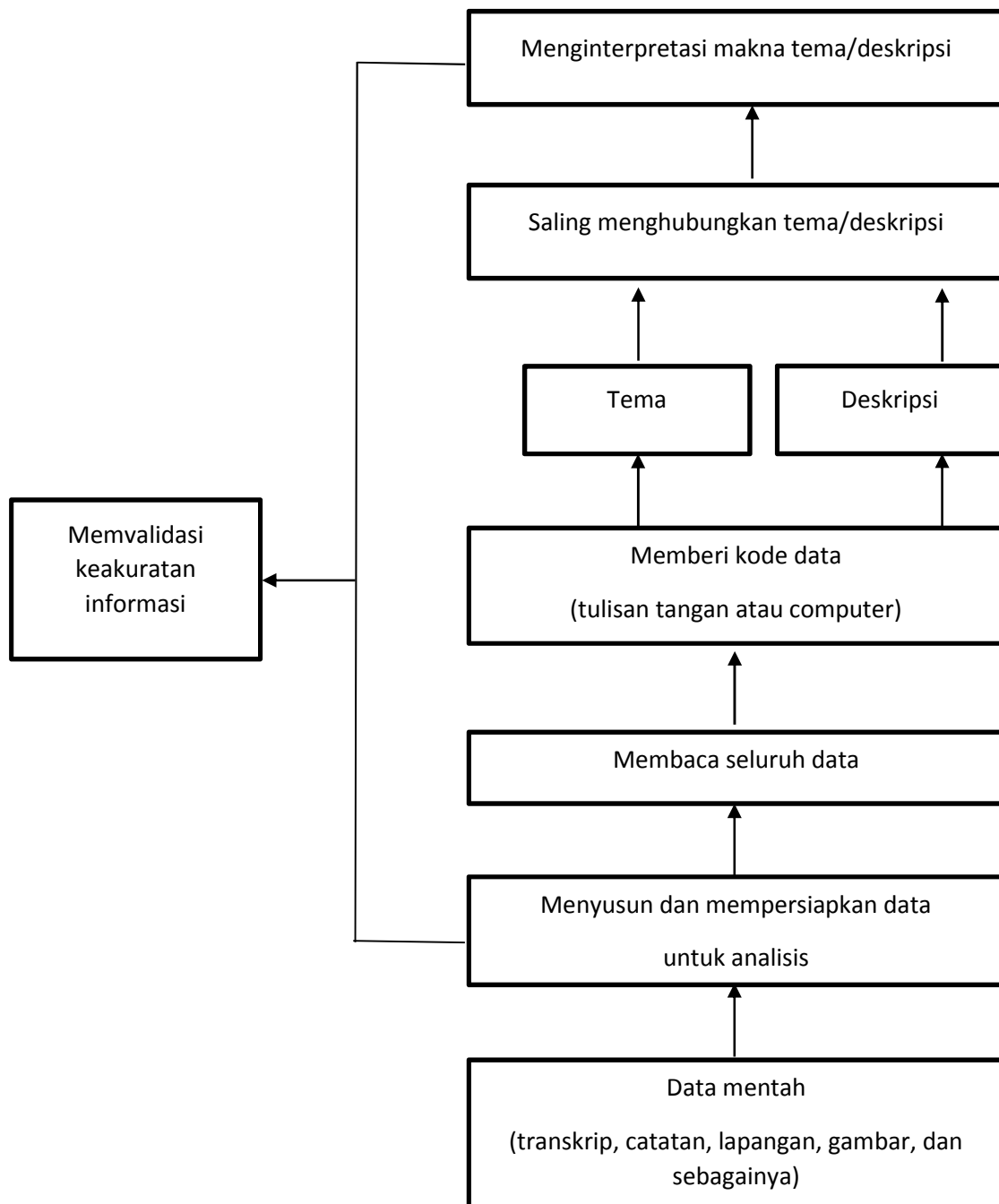
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah teknik analisis data :

- Data mentah (transkripsi, data tangan, dan sebagainya)
- Mengelolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
- Membaca keseluruhan data
- Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data
- Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang, kategori dan tema yang akan dianalisis
- Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema yang akan disajikan kembali dengan narasi atau laporan kualitatif
- Menginterpretasi makna tema/deskripsi



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber : John W. Creswell (2017 : 263)

Dalam penjelasan gambar diatas penyajian dimulai dari bawah keatas. Dalam praktiknya pendekatan tersebut lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus sesuai dengan susunan yang telah disajikan

Dari data mentah dilakukan pengolahan data dan mempersiapkan data untuk dapat dianalisis ditempat penelitian yang melibatkan transkrip wawancara men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Dalam menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Setelah disusunnya dan mempersiapkan data maka harus diteliti kembali, agar tidak adanya kesalahan baik dalam penulisan dan juga dapat memberikan kode dari setiap data-data yang telah disusun agar dengan mudah dipahami kembali oleh peneliti.

Setelah itu munculnya tema dari penelitian tersebut yang dapat mempermudah dalam mendeskripsikan dan pemaparan data yang saling berhubungan antara tema dan deskripsi teori-teori yang dipaparkan. Dan juga menginterpretasikan makna dari tema/deskripsi tersebut agar tidak adanya kekeliruan dalam pembuatan dan penyajian data dan setelahnya memvalidasi keakuratan informasi sehingga peneliti dapat mengambil makna dari setiap analisis data yang telah dilakukan.

